



SMR Royce Wijaya

# Muchamad Yuliyanto: Pemilihan Umum Uji Kekuatan Partai

Pemilihan legislatif dan presiden bakal digelar serentak, 17 April nanti. Di tengah antusiasme sebagian masyarakat, animo tak muncul kala membahas calon anggota parlemen yang bakal dicoblos. Apakah itu efek samping pemilihan serentak? Berikut perbincangan wartawan *Suara Merdeka Royce Wijaya* dengan dosen FISIP Undip **Muchamad Yuliyanto SSos MSI**.

Keempat, soliditas dan loyalitas partai atau calon pada pasangan capres-cawapres lebih berat terwujud. Kelima, amat sulit menciptakan pilihan tegak lurus antara pilpres dan pileg dengan berbagai pertimbangan pribadi pemilih dan harus disatukan saat pemilu serentak.

*Kenapa antusiasme pilpres lebih besar ketimbang pileg?*

Sampai saat ini antusiasme masyarakat selaku konstituen lebih tinggi pada pemilihan presiden sebab aspek fungsional; memilih presiden-wakil presiden akan merasakan langsung secara pribadi dari kebijakan dan kepemimpinan presiden dibanding anggota legislatif yang tak bisa langsung. Selain aspek sosiologis, yakni daya tarik ke kualitas dan kapabilitas capres lebih menarik, karena merepresentasikan wajah bangsa dan rakyat, termasuk mengelola kondisi sosiodemografis kita yang begitu besar dan majemuk.

Juga aspek komunikasi politik, ketika peran ekspose media atau dukungan wacana publik melalui media konvensional dan *new media* seperti media *online* dan media sosial begitu intensif dan ekspresif. Akibatnya, itu jadi opini publik di berbagai kalangan di masyarakat. Bahkan pemanfaatan media sosial sampai menimbulkan kanalisasi keceboran dan kampret, meski belakangan isi pesan makin tak berkualitas.

Berikutnya, dalam pilpres ekspektasi dan imajinasi publik begitu besar pada figur capres-cawapres. Sebaliknya, dalam pileg pengetahuan publik banyak terisi kabar buruk perilaku politikus dan produk kebijakan legislatif yang jauh dari harapan pemilih.

*Masyarakat tahu siapa capres-cawapres, tetapi tak banyak tahu calon legislatif. Bagaimana menurut Anda?*

Itu tak sepenuhnya benar. Meski banyak orang lebih tahu capres-cawapres, bukan berarti tak mengenal caleg. Logikanya, caleg *incumbent* tentu sudah dikenal luas di dapilnya. Apalagi ketika rajin berkomunikasi dengan konstituen dengan bekal reses atau dana aspirasi. Tentu mereka tidak hanya populer, tetapi bahkan sudah mampu membangun loyalitas pemilih. Tak heran mereka terpilih dalam tiga kali pemilu. Caleg wajah baru perlu usaha ekstra untuk populer, bahkan diunggulkan sebagai pilihan, sejak sosialisasi diri, presentasi program, sampai persuasi yang memerlukan kemahiran komunikasi

politik.

Respons terhadap partai juga beragam dengan rerata dikenal masyarakat, meski belum jaminan lolos ambang batas parlemen. Jika dibanding popularitas capres dalam perspektif agenda publik, nama caleg kalah jauh. Sebab, secara psikopolitik pilihan dalam pilpres lebih menarik dan menjanjikan bagi masa depan negara yang terukur, apalagi bila kebijakannya menyentuh hajat hidup orang banyak.

*Dengan digelar bersamaan, ada kecenderungan alam bawah sadar pemilih setelah memilih capres, juga memilih partai yang berasosiasi dengan capres. Bagaimana menurut Anda?*

Pertanyaan ini tentang *cottail effects* atau dikenal efek ekor jas. Bisa dijelaskan hanya ada tiga partai dominan menikmati efek ekor jas, yakni PDIP, Gerindra, dan PKB; bahkan di atas 90 persen. Itu dampak positif dari proyeksi kader dalam pasangan capres-cawapres. Dapat dipastikan pemilih capres tertentu akan memilih partai utama pengusung calon bersangkutan. Wajar jika diprediksi ketiga partai bakal masuk lima besar pemenang pileg 2019. Faktor pemilih yang mempertimbangkan ideologi nasionalis jelas tersedot oleh dua capres. Adapun generasi milenial dan pemilih religius *ter-cover* pada cawapres. Itulah keberuntungan partai yang diproyeksikan kader dalam formasi pasangan calon di pilpres. Partai di luar ketiganya harus berjuang habis-habisan untuk tetap bisa berada di parlemen. (28)

diapresiasi dengan pertimbangan sosiopolitik, geopolitik, dan biaya politik.

*Apa kelebihan dan kekurangannya?*

Ada beberapa kelebihan. Pertama,

biaya lebih irit dan efisien. Kedua, menciptakan efisiensi penyelenggaraan kampanye karena secara bersamaan partai atau calon legislatif harus "menjual" pribadi dan capres. Ketiga, menciptakan situasi politik yang mudah terkontrol karena konsentrasi terbagi antara pilpres dan pileg. Belum karena dituntut kondisi harus berbarengan menyosialisasikan ke pemilih. Keempat, dapat mengarahkan ke pengelolaan pemerintahan yang efisien dan kuat, karena sejak awal diketahui siapa partai dan capres yang bakal mengendalikan pemerintahan dan apa partai yang sejak dini siap berada di luar pemerintahan. Itu pun bergantung pada konsistensi capres terpilih dan daya tahan partai di luar pemerintahan.

Kekurangannya, pertama, tingkat kesulitan dan kebingungan pemilih begitu kentara. Barangkali baru mencoblos, terutama begitu besar surat suara dan nama tak sedikit. Belum lagi kerumitan saat di TPS dengan memilih nama dari lima surat suara berbeda. Inilah PR besar KPU. Peserta pemilu harus membantu menjelaskan ke masyarakat. Kedua, ketika manajemen politik tak berjalan baik pasti terjadi kegaduhan di internal partai.

Ketiga, kegaduhan makro yang berpotensi konflik ketika penyelenggara tidak antisipatif secara komprehensif di lapangan, berkait pelaksanaan pencoblosan sampai penghitungan suara dengan lima surat suara.

*Bagaimana pandangan Anda tentang pemilihan umum (pemilu) serentak ini?*

Ini salah satu format pemilu serentak terbesar di dunia. Pemilu ini diikuti banyak partai dan ribuan calon anggota legislatif. Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) berkompetisi ketat dan sarat informasi bermasalah. Konsekuensi riilnya, surat suara begitu besar dan banyak serta berkesan rumit bagi pemilih.

Dari komunikasi politik dan dinamika sarat hoaks, *fake news*, *hate speech* bahkan distorsi informasi, sehingga membingungkan dan sedikit-banyak memperkuat era *post-truth* dalam menerima dan memahami kebenaran. Pemilu serentak kali ini juga ajang ujian kekuatan partai, dari sisi manajemen, performa lembaga, dan kapabilitas calon untuk meyakinkan konstituen yang makin asketis, kritis, dan sebagian besar masih pragmatis.

Contoh, mesin pemenangan partai harus mampu meluruskan upaya pemenangan dari calon presiden yang diusung. Itu tak mudah, mengingat loyalitas ke partai atau popularitas calon sering tidak linier dengan kesediaan memilih pasangan capres-cawapres. Pemilu serentak ini butuh loyalitas dan kedisiplinan konstituen terhadap partai pilihan. Pemilu serentak merupakan ijhtihad politik dalam wujud praktik pemilu yang pantas

**Muchamad Yuliyanto SSos MSI**  
Klaten, 4 Juli 1970

#### Pendidikan

- S-1 FISIP UNS Surakarta (1996)
- S-2 Pascasarjana UNS (2007)

#### Aktivitas

- Pengelola Lembaga Survei LPSI Semarang (2005-sekarang)
- Penulis dan pembicara di berbagai media
- Mentor politik untuk partai politik di Jawa Tengah

#### Pekerjaan

- Dosen FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Semarang

#### Buku

- *Dinamika Demokrasi & Komunikasi Politik di Era Otonomi Daerah* (2011)
- *Dinamika Komunikasi Politik dan Pembangunan di Era Demokrasi* (2014). (28)

